

Deskripsi HKI Karya Ilmiah

DESKRIPSI HKI

Karya ilmiah ini berjudul **“Implementasi Kebijakan Penanggulangan Judi Online di Kabupaten Ponorogo dalam Perspektif Aparat Penegak Hukum”**, yang merupakan hasil penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Penelitian ini berfokus pada analisis implementasi kebijakan publik dalam penanggulangan kejahatan siber berupa judi online di tingkat daerah, khususnya di Kabupaten Ponorogo.

Kebaruan (novelty) dari karya ini terletak pada pendekatan analisis yang tidak hanya meninjau aspek normatif kebijakan, tetapi juga mengkaji secara mendalam perspektif subjektif aparat penegak hukum sebagai pelaksana kebijakan di lapangan. Penelitian ini mengungkap adanya dilema penegakan hukum yang kompleks, yaitu antara tuntutan penerapan hukum secara formal dengan realitas sosial, ekonomi, dan kemanusiaan yang dihadapi masyarakat.

Selain itu, karya ini memberikan kontribusi penting dalam mengintegrasikan teori implementasi kebijakan (Van Meter dan Van Horn) dengan konteks lokal daerah non-metropolitan, yang selama ini masih jarang diteliti. Penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan tidak hanya ditentukan oleh regulasi, tetapi juga oleh faktor sumber daya, kapasitas aparat, kondisi sosial-ekonomi masyarakat, serta karakteristik geografis wilayah.

Karya ini juga menghasilkan temuan empiris bahwa implementasi kebijakan penanggulangan judi online di Kabupaten Ponorogo masih belum optimal dan cenderung bersifat selektif serta reaktif akibat keterbatasan teknis, rendahnya literasi hukum masyarakat, serta dilema moral yang dihadapi aparat penegak hukum.

Nilai kebaruan lainnya adalah pada formulasi pendekatan penanggulangan yang lebih komprehensif, yaitu mengombinasikan strategi represif (penegakan hukum) dengan pendekatan preventif berbasis masyarakat, termasuk peran tokoh agama dan budaya lokal sebagai bagian dari solusi kebijakan. Hal ini memberikan perspektif baru dalam pengembangan model penegakan hukum berbasis kearifan lokal.

Secara keseluruhan, karya ini memiliki potensi sebagai **karya intelektual yang dilindungi HKI** karena memuat:

1. Analisis orisinal berbasis data empiris lapangan
2. Pengembangan konsep implementasi kebijakan dalam konteks kejahatan digital
3. Model pemahaman baru terkait dilema aparat penegak hukum
4. Rekomendasi strategis berbasis integrasi pendekatan hukum dan sosial

Karya ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan ilmu pemerintahan dan hukum, serta kontribusi praktis bagi pemerintah daerah dan aparat penegak hukum dalam merumuskan kebijakan penanggulangan judi online yang lebih efektif dan kontekstual.

DAFTAR PUSTAKA

- Aji, M. B. (2022). Tantangan penegakan hukum tindak pidana judi online di Indonesia dalam perspektif cyber crime. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 3(1), 45–62.
- Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Ponorogo. (2022). *Laporan akhir kajian dampak migrasi terhadap pembangunan daerah di Kabupaten Ponorogo*. Bappelitbangda Kabupaten Ponorogo.
- Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Ponorogo. (2024). *Kabupaten Ponorogo dalam angka 2024*. BPS Kabupaten Ponorogo.
- Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). (2023). *Laporan tahunan ancaman siber Indonesia*. Badan Siber dan Sandi Negara Republik Indonesia.
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77–101. <https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa>
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Davis, K. C. (2019). *Discretionary justice: A preliminary inquiry*. Quid Pro Books. (Karya asli diterbitkan 1969).
- Harian Joglo Semar. (2024, 15 Januari). Polres Ponorogo kembali amankan pengguna judi online. *Harian Joglo Semar*, hlm. 5.
- Hermawan, N., Yetti, Y., & Afrita, I. (2024). Penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian jenis permainan secara online. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 4(6), 1–10. <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i6.17305>
- Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo. (2023). *Data potensi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo tahun 2023*. Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo.
- Lipsky, M. (1980). *Street-level bureaucracy: Dilemmas of the individual in public services*. Russell Sage Foundation.
- Mazmanian, D. A., & Sabatier, P. A. (1983). *Implementation and public policy*. Scott Foresman.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Nonet, P., & Selznick, P. (1978). *Law and society in transition: Toward responsive law*. Harper & Row.

- Nurhalim, A. (2023). Peran kiai dan pesantren dalam pencegahan judi online di Jawa Timur: Studi kasus Ponorogo. *Jurnal Sosiologi Agama Indonesia*, 14(2), 210–228. <https://doi.org/10.22373/jsai.v14i2.2085>
- Polres Ponorogo. (2024). *Polres Ponorogo ungkap tiga kasus judi online*. Tribatanews Polda Jawa Timur. <https://tribatanews.jatim.polri.go.id>
- Prodjodikoro, W. (2018). *Tindak-tindak pidana tertentu di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Rahardjo, S. (2014). *Hukum dan perubahan sosial: Suatu tinjauan teoritis serta pengalaman-pengalaman di Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Rahayu, S. T. W. (2024). Penegakan hukum perjudian online menurut Undang-Undang ITE. *Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2), 45–58. <https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/rjih>
- rief, B. N., & Muladi. (2010). *Teori-teori dan kebijakan pidana*. Bandung: Alumni.
- Salam, H. (2024, June 18). Penegakan hukum judi online dinilai belum serius. *Kompas*. <https://www.kompas.id>
- Soekanto, S. (2014). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. RajaGrafindo Persada.
- Soekanto, S. (2019). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975). The policy implementation process: A conceptual framework. *Administration & Society*, 6(4), 445–488. <https://doi.org/10.1177/009539977500600404>
- Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975). The policy implementation process: A conceptual framework. *Administration & Society*, 6(4), 445–488. <https://doi.org/10.1177/009539977500600404>
- Wall, D. S. (2007). *Cybercrime: The transformation of crime in the information age*. Cambridge: Polity Press.
- Widodo, S. (2021). *Kejahatan dunia maya: Teori dan praktek penanggulangan cyber crime di Indonesia*. Refika Aditama.
- Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications: Design and methods* (6th ed.). SAGE Publications